

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR ISI

Bab I	Pendahuluan
	1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
	1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
	1.3. Sistematisasi Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan
Bab II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target Kinerja APBD
	2.1. Ekonomi Makro
	2.2. Kebijakan Keuangan
	2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
Bab III	Struktur Pencapaian Kinerja Keuangan
	3.1. Revisi realisasi pencapaian target kinerja keuangan
	3.2. Hasil Pengukuran Target Kinerja Keuangan akibat Covid-19
	3.3. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV	Kebijakan Akuntansi
	4.1. Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
	4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketahanan yang Ada dalam Struktur Akuntansi Pemerintah
	4.4.1 Kas dan setara kas
	4.4.2 Persediaan
	4.4.3 Aset Tetap
	4.4.4 Aset Lain-lain
	4.4.5 Belanja dan Beban
Bab V	Penjelasan Pas-Pos Laporan Keuangan
	5.1. Pas-Pos Laporan Realisasi Keuangan
	5.1.1 Belanja
	5.2. Pas-post Neraca
	5.2.1 Aset
	5.2.2 Liabilitas
	5.2.3 Ekuitas
	5.3. Pas-post Laporan Operasional
	5.3.1 Beban

5.6 The prodigies of the state of the art

5.6.1 Introduction

5.6.2 The state of the art

5.6.3 Conclusion

Book 11: The state of the art

Chapter 11: The state of the art

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk meningkatkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepada nya, dengan:

- a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) menyediakan informasi mengenai kegiatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) menyediakan informasi mengenai cara aliran pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) menyediakan informasi mengenai rencana pemerintah untuk mendanai penyelenggaraan kegiatan pemerintahannya;
- g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembayaran, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas serta entitas pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- (b) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (pelaksanaan APBN) berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- (c) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
- (d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Pasal 104 ayat (1) dan (3) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Lembaran Negara Tahun 2024

Republik Indonesia Nomor 44/19, yang merupakan bagian laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- (e) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2004 tentang Perkembangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lambiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3430);
- (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP SAP) tertanggal 13 Juni 2005;
- (g) Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lambiran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
- (h) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lambiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);
- (i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (k) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- (l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah;
- (m) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (n) Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2021 tentang perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atas daftar terlampir atas analisis nilai serta pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Termasuk pada dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diberikan dan diuraikan oleh Penyajian Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Bab 1. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika Penyajian catatan atas laporan keuangan

Bab 2. Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III *Revisi pencapaian kinerja keuangan*

- 3.1. *Revisi realisasi pencapaian target kinerja keuangan*
- 3.2. *Hasil Pergeseran Target Kinerja Keuangan akibat Covid-19*
- 3.3. *Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan*

Bab IV *Kebijakan akuntansi*

- 4.1. *Intitus pelaporan keuangan daerah*
- 4.2. *Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan*
- 4.3. *Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan*
- 4.4. *Ringkasan Penerapan kebijakan akuntansi lain yang penting berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah*
 - 4.4.1 *Kas dan Setara Kas*
 - 4.4.2 *Persediaan*
 - 4.4.3 *Aset tetap*
 - 4.4.4 *Aset Lain-lain*
 - 4.4.5 *Belanja dan Beban*

Bab V *Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan*

- 5.1. *Pos-pos laporan realisasi anggaran*
 - 5.1.1 *Belanja*
- 5.2. *Pos-pos Neraca*
 - 5.2.1 *Aset*
 - 5.2.2 *Kewajiban*
 - 5.2.3 *Ekuitas*
- 5.3. *Pos-pos Laporan Operasional*
 - 5.3.1 *Beban*
- 5.4. *Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas*
 - 5.4.1 *Ekuitas Awal*
 - 5.4.2 *Perubahan Ekuitas*
 - 5.4.3 *Ekuitas Akhir*

Bab VI *Penutup*

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA SKPD

2.1. Ekonomi Makro

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar serta mewujudkan Rencana Kerja telah menetapkan Visi yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kota Denpasar yang aman, nyaman, aman dan beraturan dalam menunjang pembangunan kota yang berwawasan budaya”.

Visi ini mengacu pada Visi Pemerintah Kota Denpasar, melalui Visi ini di jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar diharapkan mampu mengimplementasikan dalam Rencana Kerja. Berdasarkan Visi yang telah ditetapkan diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar pula menetapkan Misi, dimana Misi ini bertujuan untuk mewujudkan Visi. Misi ini meliputi :

- Meningkatkan Nilai-nilai Wawasan Kebangsaan Masyarakat Kota Denpasar;
- Meningkatkan Hubungan yang harmonis antara Pemerintah Kota dengan Lembaga-lembaga sosial Masyarakat yang ada;
- Meningkatkan Kewaspadaan Nasional Masyarakat Kota Denpasar;
- Meningkatkan kenyamanan, keamanan, ketertarikan dan ketertiban Masyarakat Kota Denpasar yang mandiri.

2.2. Kebijakan Keuangan

Arah kebijakan anggaran pada tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar dalam melaksanakan program dan kegiatan berpedoman pada :

- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No.4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar TA 2024;
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima, atas Peraturan Walikota No.57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2024;

Untuk kebijakan keuangan SKPD tertuang dalam bentuk Program dan Kegiatan SKPD yang merupakan rencana kerja yaitu :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

9. Fasilitas Kesehatan Tesis
10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kesehatan MPTI
11. Penataan dan Argo Dinevis pada MPTI
12. Pengadaan Mobil
13. Pengadaan Perakitan dan Mesin Lainnya
14. Pengadaan dan Sana, Weyatun
15. Pengadaan Jasa Kersakan, Sumber Daya dan Dinevis
16. Pengadaan Jasa Pelayanan Dinevis Kantor
17. Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan, Rupa Penyelenggaraan, Pajak dan Fasilitas Kesehatan Dinevis Operational
18. Penyelenggaraan Fasilitas dan Mesin Lainnya
19. Penyelenggaraan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
20. Penyelenggaraan/Rehabilitasi Sana dan Pemasangan Peralatan Gedung Kantor Lainnya
21. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi, Weyatun, Kelengkapan, Bola Negara, Karakter Bangsa, Penyelenggaraan Kelengkapan, Rinevis Tunggul dan Sejarah Kelengkapan
22. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi, Weyatun, Kelengkapan, Bola Negara, Karakter Bangsa, Penyelenggaraan Kelengkapan, Rinevis Tunggul dan Sejarah Kelengkapan
23. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan, Politik, Bola Budaya Politik, Penyelenggaraan Demokrasi, Fasilitas Kelengkapan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Penyelenggaraan Sistem Politik di Daerah
24. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Bola Budaya Politik, Penyelenggaraan Demokrasi, Fasilitas Kelengkapan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Penyelenggaraan Sistem Politik di Daerah
25. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Umum, Pemberdayaan Umum, Evaluasi dan Media Sengara Umum, Pengawasan Umum dan Umum Asing di Daerah
26. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kelengkapan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penyelenggaraan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kesehatan Umum Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
27. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelijen, Pemantauan, Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelengkapan Bidang Kewaspadaan, serta Penyelenggaraan Konflik di Daerah
28. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelijen, Pemantauan, Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelengkapan Bidang Kewaspadaan, serta Penyelenggaraan Konflik di Daerah
29. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelijen, Pemantauan, Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelengkapan Bidang Kewaspadaan, serta Penyelenggaraan Konflik di Daerah
30. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pemetaan Daerah Kabupaten/Kota

3.3. Realisasi Pencapaian Target Kinerja SPMD

Dalam SPMD Tahun 2024, Selain Kesenangan Beragam dan Praktis Kita Dapat melihat realisasinya 8 (delapan) program dengan 18 (delapan belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 36.461.214.716, yang terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp. 33.467.926.116, Belanja Modal sebesar Rp. 3.524.349.499, (74,67%) yang meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.248.264.144, (35,44%), Belanja Masing dan lain-lain sebesar Rp. 24.126.176.364, (68,74%), Belanja Modal sebesar Rp. 34.851.750.000, (95,6%) Sedangkan untuk Sub Anggaran 100% tercapai sebesar 75,47%.

BENTUK PENCAPAIAN KINERJA KEDANGSAN

3.1. Deskripsi Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Tujuan strategis yang terdapat dalam aspek keuangan antara lain berwujud bahwa Badan Keuangan Bangsa dan Politik berhasil meningkatkan kemandirian daerah dalam pencapaian seluruh kebutuhan belanjanya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan target kemandirian yang tinggi pada akhirnya akan dapat mengurangi ketergantungan pada pemerintah vertikal, baik Provinsi maupun Pusat. Berdasarkan tujuan tersebut maka ditetapkan strategi pencapaian target dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan intervensi dan pemanfaatan PAD.

Pada tahun berjalan dilakukan realisasi dan rencana kinerja keuangan, pertanggung jawaban atas kinerja dan dampak kemandirian Pemerintah Kota Denpasar. Dari uraian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran integral kinerja keuangan Pemerintah Kota Denpasar dari waktu ke waktu.

Pencapaian kinerja keuangan merupakan pada pencapaian/realisasi anggaran, pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD Tahun Anggaran 2023.

Tabel
Anggaran dan Realisasi APBD Belanja-Walikota Tergas dan Politik Kota Denpasar
Tahun Anggaran 2024 (dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024	Realisasi
2	Pendapatan		
2	Belanja	79.832.219.510,-	85.904.546.895,-
	Surplus/Defisit (I)		
3	Pembayaran		
	Penerimaan		
	Pembayaran		
	Pendapatan		
	Pembayaran		
	Pembayaran Netto (II)		
	SILPA (I + II)		

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 telah terjadi peningkatan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan Keuangan Bangsa dan Politik Kota Denpasar sesuai dengan urusan, bidang dan fungsi sebagai berikut :

NO.	URAIAN	Anggaran Tahun 2024	Realisasi		%
			Jumlah	Lebih / Kurang	
	Sekelompok				
1.	Pengeluaran Belanjaan Pemerintahan Perangkat Daerah	11.034.050	11.034.050	0	100%
2.	Pengeluaran Gaji dan Tunjangan ASN	6.233.819.524	5.100.864.960	1.124.814.564	81,96 %

3.	Penyediaan Komputer Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.232.000	6.232.000	0	100%
4.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.354.000	56.036.000	7.318.000	98%
5.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.047.000	15.000.000	29.000	99,74
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.880.000	14.880.000	0	100
7.	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	5.280.000	5.280.000	0	100
8.	Penelitian Kajian/Asesmen	7.500.000	7.500.000	0	100
9.	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.048.000	58.040.986	25.907.014	69,34
10.	Penyenggaraan Asesmen/Inspeksi pada SKPD	5.000.000	5.000.000	0	100
11.	Pengaliran Nebel	41.412.000	41.410.000	2.000	99,99
12.	Pengaliran Peralatan dan Mesin Lainnya	1.450.861.000	1.432.185.904	218.325.096	98,75
13.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	69.909.500	45.566.500	5.343.000	70,34
14.	Penyediaan Jasa Komunikasi/Suplai Daya Air dan Listrik	197.580.000	180.855.040	16.744.960	91,52
15.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.047.415.255	1.018.636.530	228.778.725	87,61
16.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajuk dan Perbaikan Kendaran Dinas Operasional	107.940.000	256.446.000	81.894.000	86,52
17.	Pemeliharaan Nebel	5.000.000	4.590.000	410.000	91,8
18.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.780.000	60.350.000	1.430.000	70,35
19.	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	189.450.286	10.549.714	94,72
20.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Lainnya	40.000.000	39.975.000	25.000	99,93
21.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Semesta Kebangsaan	998.494.000	970.483.350	28.010.650	97,19
22.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Semesta Kebangsaan	7.546.472.393	6.606.933.303	941.539.090	87,52

23.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebutuhan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	34.897.650.000	34.889.534.749	8.115.232	99,97
24.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebutuhan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	206.414.000	206.416.740	40.015.260	96,02
25.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	605.810.000	605.090.016	2.931.904	99,51
26.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Hutan-hutan Ekowisata, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penyediaan Penyelenggaraan Markotika, Fasilitas Kerkonvensional Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2.219.474.790	2.215.361.950	4.112.845	96,81
27.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kebutuhan Bidang Kewaspadaan serta Peningkatan Konflik di Daerah	376.204.000	333.071.525	43.132.475	88,53
28.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kebutuhan Bidang Kewaspadaan serta Peningkatan Konflik di Daerah	305.726.000	340.445.840	45.080.160	88,31

BAH IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiferensiasi dan satu atau lebih entitas akuntansi yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan tidak digabungkan pada Entitas Pelaporan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Badan Kepolisian Kota Denpasar Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Basis Akruasi (*accrual basis*) untuk Penyusunan Neraca

Akruasi kewajiban dan siklus dana dibayar dan diterima pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengukur dan membandingkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang riil. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang riil.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

4.4.1 Kas dan Setara Kas

4.4.2 Persediaan

4.4.3 Aset tetap

4.4.4 Aset Lain-lain

4.4.5 Belanja dan beban

4.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/ dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari alokasi uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYPH) yang belum diterima ke kas daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang legas, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran
(Laporan Keuangan Tahun 2023)

dinilai sebesar nilai nominal asrinya diupayakan sebesar nilai rupahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.2. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang disediakan untuk dipajal dan/atau diberikan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dinilai sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/hibah.

4.3. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jembatan, dan Jaringan. Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Akumulasi Penyusutan. Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang mematrik umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

4.3.1. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat tulis; alat angkutan; alat bengkel dan alat rumah; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat personalisasi komputer; alat eksploitasi; alat pemukiman; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat rumah eksploitasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dinilai dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang diperoleh dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan.

4.3.2. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bersejarah seni/budaya/alam ragu. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya termasuk juga didalamnya aset tak berwujud yang juga mengalami penyusutan (*Amortisasi*). Harga perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data historis nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

4.4 Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar/aset tetap atau aset takwujud. Contohnya sebagai aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potensial service) di masa depan. Berbagai termasuk kebetul aset lainnya tersebut memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

4.4.1. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan service dalam meningkatkan tugas dan fungsi pemerintah dan pemerintahan serta sebagai diperoleh dari proses pengakuan dari hasil kreatif. Aset Tak Berwujud yang ada di Badan Keuangan Bangsa dan Politik Kota Denpasar berupa Software, Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

4.4.2. Aset Lain-lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk diberikan dari penggunaan aset pemerintah diklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat,asing, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses penandatanganan (proses penjualan, sewa beli, pengalihan, pertukaran modal). Aset lain-lain diakui pada saat dibentuk dari penggunaan aset pemerintah dan diklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

4.5 Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi beban daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu belanja operasi, belanja tak terbagi dan belanja bagi hasil-mandiri. Belanja Operasi diklasifikasikan atas belanja barang, belanja hibrid, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang memerlukan alokasi, yang dapat berupa pengalihan atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

DABV
PEJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1.1 BELANJA DAERAH

Belanja dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Belanja daerah dengan target anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 59.102.219.510,- realisasinya sebesar Rp. 55.924.549.849,- atau 94,64%, sedangkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 31.578.472.450,-.

Rincian atas jumlah belanja dengan anggarannya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024	Realisasi	
			Jumlah	Reali (%)
1	BELANJA PEGAWAI	6.233.619.524,00	5.108.804.940,00	81,96
2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.362.026.992,00	14.528.075.891,00	82,79
3	BELANJA LAINNYA	34.506.573.000,00	34.811.754.801,00	100,00
4	BELANJA MODAL	1.000.000,00	1.475.813,968,00	87,89
	Jumlah	59.102.219.510,00	55.924.549.849,00	94,62

Belanja Langsung dan Tidak Langsung secara berpersinet adalah sebagai berikut :

1.1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dengan target anggaran Tahun 2024 sebesar Rp.6.233.619.524,- realisasi pengeluarannya sebesar Rp. 5.108.804.940,- atau 81,96%, sedangkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp. 4.087.782.680,-.

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024	Realisasi	%
	Belanja Pegawai			
1	Gaji dan Tunjangan	2.454.926.314,00	1.877.302.976,00	76,47
2	Tambahan Penghasilan PNS	3.775.695.200,00	3.228.501.964,00	85,51
3	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	Jumlah Belanja Pegawai	6.233.619.524,00	5.108.804.940,00	81,96

1.2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa dengan target anggaran Tahun 2024 sebesar Rp.16.262.556.993,-, realisasi pengeluarannya sebesar Rp. 14.539.728.001,- atau 89,99%, sedangkan realisasi Tahun 2023 Rp. 8.164.612.770,-.

Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	Belanja Barang Pakai Habis	4.287.815,893	3.600.136,893	83,96
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	31.050,000	31.050,000	100,00
3	Belanja Jasa Kantor	4.562.582,000	4.122.968,040	90,36
4	Belanja Bahan Jamuan/Akumasi	191.865,255	190.336,530	99,20
5	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	265.000,000	265.000,001	100,00
6	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	554.400,000	554.400,001	100,00
7	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	141.560,000	133.795,000	94,51
8	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200.000,000	189.450,286	94,73
9	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi	11.000,000	10.950,000	99,55
10	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	40.000,000	39.975,000	99,94
11	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Uang dan/atau Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Manajemen	3.111.196,000	2.426.214,255	77,98
12	Ketiga/Pihak Lain/Manajemen	2.965.017,845	2.964.103,000	99,96
	Jumlah	16.262.556.993	14.528.379.006	88,79

1.3) Belanja Hibah

Belanja hibah dengan target anggaran Tahun 2024 setelah perubahan sebesar Rp 34.811.750.001,-, realisasi pengeluarannya sebesar Rp 34.811.750.001,- atau 100%, Sedangkan Tahun 2023 sebesar Rp 19.002.285.000,-.

No	Uraian	Anggaran Tahun 2023	Realisasi	%
	Belanja Hibah			
1	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga Organisasi Masyarakat dan Bertujuan Maksud Indonesia	56.580.000,00	56.580.000,00	100,00
2	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.671.378.061,00	1.671.378.061,00	100,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Memiliki Vertikal, Sukurita dan Sosial yang Diberikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	21.115.000.000,00	21.115.000.000,00	100,00
	Jumlah Belanja Hibah	34.011.758.061,00	34.011.758.061,00	100,00

a). **Belanja Peralatan dan Mesin**

Belanja Peralatan dan Mesin dengan target anggaran Tahun 2024 dengan target anggaran adalah perubahan sebesar Rp. 1.650.061.000,- dengan realisasi pengeluaaran sebesar Rp. 1.475.615.904,-. Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal secara keseluruhan.

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024	Realisasi	Rebut (%)
			Jumlah	
1	Belanja Tanah	-	-	
2	Belanja Peralatan dan Mesin	1.582.518.000	1.304.190.904	86,20
3	Belanja Gedung	-	-	
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jembatan	-	-	
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	111.775.000	111.425.000	99,68
6	Belanja Aset Lainnya	-	-	
	Jumlah	1.694.293.000	1.475.615.904	87,09

b). **Kas di Bendahara Pengeluaran**

Rp. 17.715.681,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran pada SHPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per tanggal 27 Desember 2024 yang disetor ke Kas Daerah.

c). **Persediaan**

Rp. 400.000,-

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan barang habis pakai dan yang ada pada semua SKPD per 31 Desember 2024.

d). **Belanja Aset Tetap Lainnya**

Belanja Aset Tetap Lainnya dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 111.775.000 dengan realisasi pengeluaran sebesar Rp. 111.425.000,-. Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal secara keseluruhan.

5.2 **Pos-pos Neraca**

5.2.1 **ASET**

Aset Tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar terdiri dari Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya serta Aset Lainnya.

a.	Peralatan dan Mesin		3.596.782.448,84
	1	Alat-alat Besar	0
	2	Alat-alat Angkutan	2.600.000
	3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.686.116.720
	4	Alat Pertanian	61.773.800
	5	Alat Studio, Komunikasi dan Penancar	542.165.400
	6	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.644.082.032,84
	7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	11.595.700
	8	Alat Laboratorium	36.748.000
	9	Komputer	880.720.700
	10		
b. Gedung dan Bangunan			3.270.874.000
	1	Bangunan Gedung	3.270.874.000
	2	Mosumen	-
c. Jalan, Irigasi dan Jaringan			
	1	Jalan dan jembatan	-
	2	Bangunan Air/Irigasi	-
	3	Instalasi	-
	4	Jaringan	-
d. Aset Tetap Lainnya			914.322.971
	1	Buku dan Perpustakaan	1.447.065
	2	Barang Berwujud Kebudayaan	714.396.160
	3	Hewan dan Ternak serta Tanaman	14.877.500
	4	Aset Renovasi	295.227.246
e. Aset Lainnya			58.563.000
	1	Aset Kondisi Rusak Berat	-
	2	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-
	3	Aset Tidak Berwujud	-
Aset Lain-Lain			
Aset Lain-Lain			58.563.000

Dari data pada tabel diatas dapat dijabarkan bahwa :

1. Peralatan dan Mesin

Saldo awal peralatan dan mesin sebesar Rp 3.596.782.488,04 dan terdapat belanja modal senilai Rp 1.475.615.904, kemudian terdapat mutasi keluar antar OPD sebesar Rp 283.080.000,- sehingga saldo akhir peralatan dan mesin Rp 4.675.893.152,84,-.

2. Gedung dan Bangunan

Terdapat penambahan aset tetap gedung dan bangunan dari bantuan KPR Kota Denpasar sebesar Rp 1.250.874.000,-.

5.2.2 Aset Bunk Berat

Peralatan dan Mesin yang termasuknya Bunk Berat (KB) sebesar Rp 297.455.394,- tidak masih tercatat sebagai aset peralatan mesin pada neraca.

5.2.3 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah saat terjadinya peristiwa htk dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya dari Kas Umum Daerah (LS) atau di Beerdhara Pengeluaran (BP/GU). Berikut merupakan penjelasan atas Neraca untuk Pos Kewajiban per tanggal Neraca dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Utang Belanja Telepon	257.136,00	205.882,00
2	Utang Belanja Air	932.200,00	1.189.500,00
3	Utang Belanja Listrik	4.264.921,00	3.896.123,00
	Jumlah	5.454.257,00	5.291.505,00

5.2.4 EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Selisih ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih mutasi Aset tetap, dan lain-lain.

Berikut ini merupakan penjelasan atas Neraca untuk Pos Ekuitas per tanggal Neraca dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Ekuitas	3.847.785.171	2.768.010.310

1.2. Poo-Poo Laporan Operasional

1.2.1. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang memerlukan ekuitas, yang dapat berupa pengurangan aset konsumtif aset atau timbulnya kewajiban.

Berdasarkan perhitungan beban operasional selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.	Beban Pegawai	5,108,804,980.00	4,067,692,790.00
2.	Beban Barang dan Jasa	16,529,336,623.00	8,195,128,183.00
3.	Beban Hibah	34,611,750,000.00	19,082,285,000.00
4.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	79,946,131.00	1171,538,928.00
5.	Beban Penyusutan Peralatan Gedung dan Bangunan	32,705,740.00	65,417,480.00
6.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	7,381,713.00	14,762,424.00
7.	Beban Penyusutan Amortisasi ATB	-	-
8.	Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	-	278,883,000.00
	Jumlah	54,964,927,648.00	31,572,621,999.00

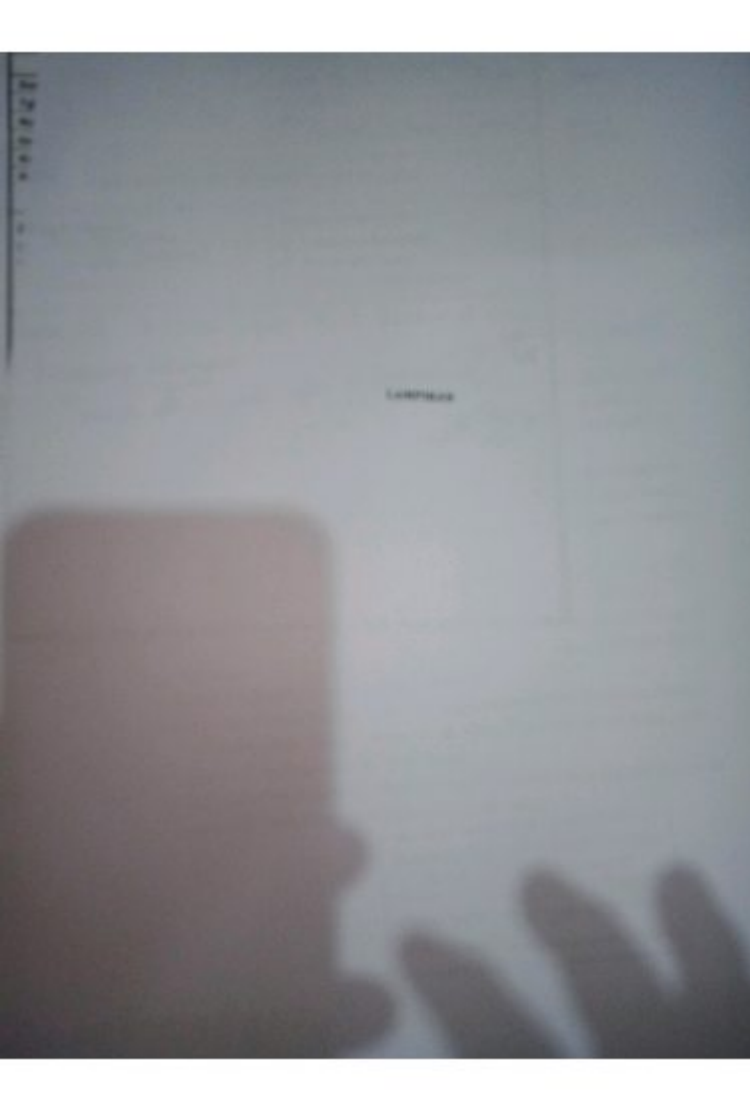
BAB VI
PENUTUP

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Keuangan Daerah dan Politik Kota Denpasar sesuai SAP berbasis Akuntansi pemerintahan SAP yang menguraikan pendapatan, belanja, aset, utang dan ekuitas dalam pelaksanaan keuangan berbasis akuntansi serta menguraikan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaksanaan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang di tetapkan dalam APBD.

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kota Denpasar



Angus Nandana Purno Anandita SE
NIP. 19720313 199903 1 002



ASSET LAINNYA

Lampiran D

UNIT : BADAN KESEHATAN BANGSA DAN POLIKLINIK KOTA TEBERAKAH

NO.	REKAM	SALDO AWAL 31/12/77	PENYUSUTAN 1/1/81 s.d. 31/12/78	PENYUSUTAN 1/1/79 s.d. 31/12/81	AKRUISITASI	PENYUSUTAN	SALDO AKHIR 31/12/78
1	Objek Perolehan Anggakan						
2	Peralatan Kantor Bang.						
3	Perawatan dengan Teknik Bang.						
4	Barang Tak Berwujud						
5	Saldo Lain-lain	242.448.000				127.489.100	114.958.900
	Jumlah	242.448.000	-	-	0	127.489.100	114.958.900

ASSET TELAP

UNIT : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DEPAKASAR

NO	URAIAN	SALDO AWAL 31/12/23	PENAMBAHAN 1/1/24 S/D 31/12/24	PENGURANGAN 1/1/24 S/D 31/12/24	AKUMULASI PENYUSUTAN	SALDO AKHIR 31/12/24
1	Tanah					
2	Peralatan dan Meubel	3.596.782.448,84	1.364.198.994	281.480,00	3.352.434.194,84	1.323.059.154,00
3	Landung dan Bangunan	3.270.874.000	-	-	904.941.807	2.365.932.193,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	914.322.971	111.425.020	-	876.940.794,08	1.48.801.177,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-
	Jumlah	7.781.979.419,84	1.475.615,901	205.400,000	5.134.322.795,84	3.837.794.578,00

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kota Depok
 13 1996031 002

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
LAPOBAN PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN
SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR
TAHUN 2024

PROGRAM DAN KEGIATAN		% PENYERAPAN	WAKTU	ANGGARAN	REALISASI	%
No	NAMA	PERSYARUAN	PELENGKAPAN	(Rp)	(Rp)	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar Kabupaten Kota					
1	Peningkatan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Peningkat Dasar	100%	1 Tahun	11.004.000	11.004.000	100,00
2	Administrasi Keuangan Peningkat Dasar	100%	1 Tahun	6.222.019.524	6.180.904.543	99,33
3	Administrasi Usaha Peningkat Dasar					
	Pengawasan Komptrol Kualitas Layanan/Peningkatan Kegiatan Sosial	100%	1 Tahun	6.232.000	6.232.000	100,00
	Peningkatan Perilaku dan Perilaku Kanker	100%	1 Tahun	62.255.000	57.236.000	92,10
	Peningkatan Perilaku Kanker Tumor	100%	1 Tahun	33.840.000	15.000.000	44,35
	Peningkatan Beras Gizi dan Pangan	100%	1 Tahun	14.000.000	14.000.000	100,00
	Peningkatan Riset dan Inovasi	100%	1 Tahun	5.200.000	5.200.000	100,00
	Peningkatan Riset dan Inovasi	100%	1 Tahun	7.500.000	7.500.000	100,00
	Peningkatan Riset dan Inovasi	100%	1 Tahun	66.940.000	58.640.500	87,60
	Peningkatan Riset dan Inovasi	100%	1 Tahun	3.000.000	3.000.000	100,00
4	Peningkatan Riset dan Inovasi					
	Peningkatan Riset dan Inovasi	100%	1 Tahun	81.312.000	81.312.000	100,00
	Peningkatan Riset dan Inovasi	100%	1 Tahun	142.000.000	142.185.000	100,13
5	Peningkatan Riset dan Inovasi					
	Peningkatan Riset dan Inovasi	100%	1 Tahun	48.900.000	48.900.000	100,00
	Peningkatan Riset dan Inovasi	100%	1 Tahun	197.200.000	189.035.000	95,86
	Peningkatan Riset dan Inovasi	100%	1 Tahun	1.847.415.200	1.847.415.200	100,00
6	Peningkatan Riset dan Inovasi					
	Peningkatan Riset dan Inovasi	100%	1 Tahun	337.940.000	337.940.000	100,00
	Peningkatan Riset dan Inovasi	100%	1 Tahun	5.000.000	4.999.000	99,98
	Peningkatan Riset dan Inovasi	100%	1 Tahun	61.700.000	61.700.000	100,00
	Peningkatan Riset dan Inovasi	100%	1 Tahun	200.000.000	200.000.000	100,00
	Peningkatan Riset dan Inovasi	100%	1 Tahun	40.000.000	39.975.000	99,94
	Peningkatan Riset dan Inovasi					
	Peningkatan Riset dan Inovasi					

[illegible]

Lampiran VI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR
KEWAJIBAN KEPADA NEGARA (PAJAK)
 PER 31 DESEMBER 2024

NO.	PAJAK	PUNGUT	SETOR	SISA YANG BELUM DISETOR	KETERANGAN TGL DISETOR
1	Belanja Langsung				
	PPH pasal 21	825.894.718	825.894.718	NIHIL	
	PPH pasal 22	52.422.325	52.422.325	NIHIL	
	PPH pasal 23	84.705.055	84.705.055	NIHIL	
	PPN	609.577.631	609.577.631	NIHIL	
	Jumlah	1.569.599.729	1.569.599.729		

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Denpasar
 Tanggal Anggaran

 Nama Petrus Amsada SE
 10313 199603 1 002

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DANA BERKUTIR
RAJUAN KESAYITAN BAKUASA DAN FILTER KOTA DENPASAR
Per 31 DESEMBER 2024

No.	Program	APBN			APBD		
		Berkas / Isi	Profil/Indikator	Berkas / Isi	Berkas / Isi	Profil/Indikator	Berkas / Isi
		1	100%	1 x 1 x 1	1	1 terdapat	1 terdapat 3 x 1 x 1
	WISATA	WISATA	WISATA	WISATA	WISATA	WISATA	WISATA

Kantor Kepala Dinas Kearsifan dan Pelestarian
 Kota Denpasar
 Jl. Gajah Mada No. 10
 Denpasar, Bali 80111
 Telp. (0361) 1234567
 Email: kds@denpasar.go.id




**BELANJA MODAL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PER 31 DESEMBER 2023**

NO.	URAIAN (JENIS BARANG)	VOL / LUAS / JUMLAH BARANG	SATUAN	NILAI PEROLEHAN	KETERANGAN
1	Tanah	-	-	-	-
2	Pembelian dan Modal	-	-	-	-
	Belanja Modal Instalasi Sementor Pemumpang	1		270.000.000,00	
	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	1		3.444.000,00	
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	4		42.600.000,00	
	Belanja Modal Mebel	12		43.430.000,00	
	Belanja Modal Alat Pendingin	3		104.614.000,00	
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8		49.280.000,00	
	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	2		5.231.000,00	
	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	2		464.625.904,00	
	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	-		0,00	
	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	4		23.815.000,00	
	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	10		30.000.000,00	
	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	1		9.950.000,00	
	Belanja Modal Personal Computer	7		103.990.000,00	
	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	7		129.000.000,00	
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	-		0,00	
	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	4		53.059.000,00	
	Belanja Modal Alat Musik	1		111.425.000,00	
3	Jembatan dan Bangunan	-	-	-	-
	- Gedung Kantor	-	-	-	-
4	Jalan, Irigasi dan Jembatan	-	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
	JUMLAH	117		1.475.615.404,00	0
					Nilai

Kepala Badan Kesenian Bangsa dan Politik

Kata Dimpak
Kata AnggarDitandatangani dan
2023121916031902

Lampiran Anggaran Tahun

BUMAH KEBANTUAN BANGSA DAN PILIHAN NOTA DENPASAR
LAPORAN KEAIDAMAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2021 DAN 2022

(dalam rupiah)

NO. URUT	URAIAN	Anggaran TA 2021 (Rp)	Revisi TA 2021 (Rp)	(%)	Realisasi Aktual TA 2021 (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	-	-	-	-
4.2.00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-	-
4.2.01.01	Dana Perimbangan	-	-	-	-
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	-	-
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	-	-	-	-
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	-	-	-	-
4.2.01.01.05	Dana Alokasi Khusus Penunjang	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	-
4.2.01.02.01	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	-
	Jumlah Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	-
4.2.01.03	Dana Desa	-	-	-	-
4.2.01.03.01	Dana Desa	-	-	-	-
	Jumlah Dana Desa	-	-	-	-
4.2.01.06	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	-	-	-	-
4.2.01.06.01	Dana Penunjang	-	-	-	-
	Jumlah Pendampingan Transfer Lainnya	-	-	-	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-	-	-
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	-	-
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-	-	-
	Total Pendapatan Transfer	-	-	-	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	-
4.3.01	Lain-lain Pendapatan Daerah dengan Karakteristik Pendapatan Perorangan Warga	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
5	BELANJA DAERAH	58.182.516.518,00	58.924.518.945,00	94,62	11.878.616.247,00
5.1	BELANJA OPERASI	57.487.526.518,00	56.448.822.945,00	94,88	11.878.616.247,00
5.1.01	Belanja Pegawai	5.213.609.324,00	5.138.834.348,00	82,96	4.367.882.993,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.382.196.993,00	14.528.375.884,00	98,29	4.653.328.712,00
5.1.03	Belanja Hibah	34.811.750.001,00	36.811.750.001,00	998,00	2.849.474.543,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	57.487.526.518,00	56.448.822.945,00	94,88	11.878.616.247,00

DAFTAR KERTAS BERKAS DAN PERLEKATAN DOKUMEN
 LAPORAN PENELITIAN

DAFTAR TABEL 5. ANG. BERKAS DAN PERLEKATAN DOKUMEN 30 Desember 2004 DAN 2005

noted as significant

[illegible]



1. Name of the person: _____
2. Address: _____
3. City: _____ State: _____ Zip: _____
4. Date of birth: _____
5. Date of issue: _____
6. Date of expiration: _____



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	TA 2024 (Rp)	Revisi Audited TA 2023 (Rp)
Ekuitas Awal	2.768.018.330,00	2.712.255.719,00
Surplus (Defisit) L0	(54.564.927.648,00)	(31.822.721.837,00)
<i>Dampak Kerasukan Perubahan Kebijakan/Kendala Monev</i>		
Koreksi Aset Tetap Tanah		
Koreksi Aset Tetap Perakitan dan Mesin		
Koreksi Aset Tetap Gedung dan Bangunan		
Koreksi Aset Tetap Jalan, Jangki dan Jaringan		
Koreksi Aset Tetap Lainnya		
Koreksi KDP		
Koreksi Aset Lain-Lain		
Koreksi Aset Tak Berwujud		
Koreksi Akmadani Penyusunan Gedung dan Bangunan		
Koreksi Akmadani Penyusunan Aset Tetap Lainnya		
Koreksi Prurang Hasil Pengolahan KDDYD		
Koreksi Pendapatan Pajak Daerah		
Koreksi Denda Pajak		
Koreksi Dana Bantuan		
Koreksi Hutang Belanja Modal		
Koreksi Hutang Belanja Transfer		
Koreksi Bauran Modal Antar OPD		
Koreksi Bauran Keluar Antar OPD	287.000.000,00	
RE PERUBAHAN	47.564.132.147,00	31.578.472.450,00
Ekuitas Akhir	(3.847.788.171,00)	2.768.018.330,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
 Kota Denpasar

Anggerah



KORONA PUTRA ARNANDA SP

Np. 191.20313.199603.1002

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

URAIAN	TA 2024	TA 2023
	(Rp)	(Rp)
ASET		
Aset Lancar	1.893.239.428,00	1.773.371.835,00
Kas dan Setorannya Pengeluaran	-	-
Saluran Saluran dan Perantara	488.000,00	720.227,00
Aset Lintas	-	-
Aset Tidak Lancar	-	-
Bendahir	488.000,00	720.227,00
Bendahir Tetap	-	180.000,00
Saluran Perantara	-	-
Perantara Saluran (Saluran Perantara)	-	-
Aset Saluran untuk Kegiatan Saluran Lainnya	-	-
Jumlah Aset Lancar	488.000,00	720.227,00
Aset Tetap		
Tanah	-	-
Perumahan dan Mestri	4.625.493.352,84	3.958.782.448,84
Gedung dan Bangunan	3.270.874.000,00	1.270.874.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Aset Tetap Lainnya	1.025.543.971,00	914.322.971,00
Kumulasi Depresiasi Perumahan	-	-
Kumulasi Penyusutan Aset Tetap	(5.114.322.795,84)	(5.024.286.711,84)
Kumulasi Penyusutan Perumahan dan Mestri	(3.352.034.194,84)	(5.282.488.163,84)
Kumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(914.341.807,00)	(872.211.167,00)
Kumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Kumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(870.246.794,00)	(869.545.581,00)
Jumlah Aset Tetap	3.857.792.828,00	2.787.692.708,00
Aset Lainnya		
Aset yang Dimoratorium Pihak Lain	-	-
Aset Lain-lain	342.448.000,00	342.448.000,00
Kumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(327.489.100,00)	(327.489.100,00)
Aset Tak Berwujud	-	78.350.000,00
Amortisasi ATB	-	(78.350.000,00)
Jumlah Aset Lainnya	14.958.900,00	14.958.900,00
JUMLAH ASET	3.855.239.428,00	2.773.371.835,00
KEWAJIBAN		
Kewajiban Jangka Pendek		
Utang Belanja	-	-
Utang Belanja Pegawai	-	-
Utang Belanja Tambahan Penghasilan Berwujud dan Tidak Berwujud	-	-
Kartu ASN dan BPJS TPP 4%	-	-
Utang Belanja Barang/Jasa	8.434.287,00	4.728.865,00
Utang Belanja Jasa Kantor - Tagihan Telepon	287.136,00	265.882,00
Utang Belanja Jasa Kantor - Tagihan Listrik	932.200,00	1.898.123,00
Utang Belanja Jasa Kantor - Tagihan Air	4.264.922,00	1.199.590,00
Utang Belanja Pembiayaan Non ASN	-	-
Utang Jasa BPJS Kesehatan Non ASN	-	-

URAIAN	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
Utang Beban Persediaan		
Utang Beban Hibah		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	5.454.257,00	10.090.370,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	5.454.257,00	10.090.370,00
EKUITAS DANA		
Ekstern	3.847.785.171,00	2.763.281.465,00
JUMLAH EKUITAS	3.847.785.171,00	2.763.281.465,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.853.239.428,00	2.773.371.835,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

Imputa Badan Eksekutif Bangsa dan Politik

Eka Desquair

Anggota



Badan Eksekutif Bangsa dan Politik

1401013 199403 1 002